

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN EVALUASI LINGKUNGAN KEBIJAKAN

Dwi Indah Yuliani Solihin<sup>1</sup>, Sri Harianti Tahir<sup>2</sup>, Siti Amelia Giu<sup>3</sup>,  
Sindri Karim Doe<sup>4</sup>, Yuliana Latongko<sup>5</sup>

[dwiindah@ung.ac.id](mailto:dwiindah@ung.ac.id)<sup>1</sup>, [tahirsrihariyanti@gmail.com](mailto:tahirsrihariyanti@gmail.com)<sup>2</sup>, [amelgiu30@gmail.com](mailto:amelgiu30@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[sindrikarimdoe@gmail.com](mailto:sindrikarimdoe@gmail.com)<sup>4</sup>, [yulianalatongko@gmail.com](mailto:yulianalatongko@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Negeri Gorontalo

### ABSTRAK

Wibawa (1994) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar. Biasanya tertuang dalam suatu undang-undang. Namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi yang penting atau keputusan perundang-undangan. Idealnya, keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses implementasi tersebut. Menurut Gephart bahwa nilai adalah jantung evaluasi, namun evaluasi lebih banyak digunakan untuk menjelaskan usaha atau cara mencari kebenaran pada kebijakan atau program yang sedang berjalan bukan untuk mencari nilai. Sehingga tujuan dari evaluasi kebijakan bukan untuk membuktikan dengan nilai namun untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, ataupun kinerja suatu program atau kebijakan (Hajaroh, 2019). (Concepts and Evaluation 2023).

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan; Evaluasi Kebijakan; Efektivitas Program.

### ABSTRACT

Wibawa (1994) stated that policy implementation is the embodiment of fundamental policy decisions. This is usually enshrined in a law. However, it can also take the form of important instructions or legislative decrees. Ideally, these decisions clarify the issues to be addressed, define the objectives to be achieved, and in various ways "describe the structure" of the implementation process. According to Gephart, values are at the heart of evaluation, but evaluation is more often used to explain efforts or methods for finding truth in ongoing policies or programs, rather than to seek values. Therefore, the goal of policy evaluation is not to prove with values, but to improve the effectiveness, efficiency, or performance of a program or policy (Hajaroh, 2019).

**Keywords:** Policy Implementation; Policy Evaluation; Program Effectiveness.

### PENDAHULUAN

Wahab (2008) menyatakan bahwa policy implementation encompasses those actions by public or private individuals groups that are directed the achievement of objecteves set forth in prior decision (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuantujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan). Tentang implementasi kebijakan, Udoji mengatakan dengan tegas bahwa The execution of policies is a important if not more important than policy-making. Policy will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapih dalam arsip jika tidak diimplementasikan). Oleh karena itu implementasi kebijakan perlu dilakukan secara arif, bersifat situasional, mengacu pada semangat kompetensi, dan berwawasan pemberdayaan. sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik terjadi karena tindakan-tindakan pemerintahan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan-

keputusan tersebut. Kebijakan ini dipandang sebagai proses perumusan kebijakan yang diterapkan, dilaksanakan dan dievaluasi melalui tahapan-tahapan (Awang, 2010). Secara singkat Winarno (2008) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Sementara itu Mufiz (1999), menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan. Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penyusunan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka (library research) yaitu mencari atau menemukan data dari berbagai sumber yang relevan dengan konsep umum evaluasi kebijakan, kemudian dilengkapi dengan pemikiran penulis tentang topik yang di sajikan. Sumber data yang diperoleh melalui metode studi pustaka berasal dari buku, jurnal dan riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengatasi masalah melalui penelaahan kritis (Fadli, 2021). Studi Pustaka adalah bagian mendasar dari suatu kerangka penelitian untuk mendukung penelitian lain yang sesuai dan memperdalam kajian pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Wibawa (1994) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar. Biasanya tertuang dalam suatu undang-undang. Namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi yang penting atau keputusan perundang-undangan. Idealnya, keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses implementasi tersebut.(library research ). n.d.)

Implementasi kebijakan publik tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan. Bahkan lebih dari itu, Grindle (1980) menyatakan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan tersebut.

Secara singkat Winarno (2008) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuantujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Sementara itu Mufiz (1999), menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan. Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri.

Kebijakan memerlukan evaluasi untuk dapat meninjau sejauh mana target yang telah tercapai, aspek apa saja yang perlu diperbaiki atau dipertahankan agar menghasilkan kebijakan yang lebih bermanfaat di waktu yang akan datang. Kemajuan dari suatu

program yang terdapat pada suatu kebijakan dapat dilihat melalui evaluasi (Prabowo et al., 2022).

## **2. Pengertian Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu ‘evaluation’; yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penilaian. Akar kata evaluasi dalam bahasa Inggris adalah ‘value’; yang dalam bahasa Indonesia adalah; nilai. William Dun mengartikan bahwa evaluasi adalah melakukan penaksiran (appraisal), memberi skor (rating), dan menilai (assessment), segala hal yang berhubungan dengan cara untuk memproduksi dan melakukan analisis informasi berkaitan dengan nilai dan manfaat dari kebijakan (Hayat, 2019, p. 35). Suchman beranggapan bahwa evaluasi adalah suatu tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mendeskripsikan, menemukan, dan memberikan informasi yang bermanfaat guna menilai alternatif keputusan. Hal senada disampaikan oleh Stufflebeam bahwa evaluasi adalah metode sains untuk melakukan tindakan program guna memperoleh ukuran yang objektif dan valid mengenai pencapaian program tersebut. Sementara itu Scriven menyatakan evaluasi adalah proses untuk menentukan manfaat, nilai, atau nilai suatu produk dari proses tersebut. Istilah yang merujuk dari proses ini meliputi: menilai, menganalisis, mengkritik, memeriksa, menilai, memeriksa, meninjau peringkat dan mempelajari (Mergoni & De Witte, 2022).

Evaluasi adalah sebagai tahapan penting yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan (Hajaroh, 2019). Sedangkan Halimah (2020, p. 33) mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk memperoleh penilaian yang dilakukan selama kegiatan sedang berjalan ataupun saat telah berakhir. Evaluasi adalah sebuah prosedur atau kegiatan yang dijalankan dengan proses yang teratur dengan melibatkan sebabsebab keberhasilan serta kegagalan suatu kebijakan (Prabowo et al., 2022). Berdasarkan pendapat yang disampaikan di atas, pengertian evaluasi menurut penulis adalah suatu tahapan penting dengan metode sains yang teratur untuk melakukan proses memeriksa, menggambarkan dan menilai dengan melibatkan sebab-sebab keberhasilan dan kegagalan yang dilaksanakan pada kegiatan berjalan atau telah berakhir hingga memperoleh dan menyediakan informasi yang objektif yang valid mengenai pencapaian suatu program atau kebijakan.(Concepts and Evaluation 2023)

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan menganalisis dan menilai implementasi kebijakan yang berlangsung selama kegiatan berjalan atau ketika kegiatan berakhir dengan tujuan untuk memutuskan apakah keputusan tersebut layak untuk dilanjutkan, dilanjutkan dengan terdapat perbaikan atau dihentikan (Akbar & Mohi, 2018; Prabowo et al., 2022). Sedangkan menurut Affrian (2020) evaluasi kebijakan adalah kegiatan mengenai estimasi atau penilaian terhadap konteks, pelaksanaan dan pengaruh pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan menurut Kosowan (2022) hasil dari evaluasi kebijakan digunakan untuk membuat penilaian yang berguna untuk menginformasikan keputusan masa depan tentang pengembangan kebijakan tersebut. Hal senada disampaikan oleh Halimah (2020: 34) bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan penilaian terhadap suatu program yang berasal dari pihak berwenang melalui substansi/isi program, implementasi dan dampak dari kebijakan.

Menurut Gephart bahwa nilai adalah jantung evaluasi, namun evaluasi lebih banyak digunakan untuk menjelaskan usaha atau cara mencari kebenaran pada kebijakan atau program yang sedang berjalan bukan untuk mencari nilai. Sehingga tujuan dari evaluasi kebijakan bukan untuk membuktikan dengan nilai namun untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, ataupun kinerja suatu program atau kebijakan (Hajaroh, 2019). Mengacu pada uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka evaluasi kebijakan adalah suatu usaha menganalisis guna mencari kebenaran terhadap program yang berasal dari pihak

berwenang melalui substansi/isi program, implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut sehingga mampu menyediakan informasi yang objektif dan valid mengenai pencapaian suatu program atau kebijakan.

### **3. Tujuan Evaluasi**

Tujuan Evaluasi Kebijakan Tujuan evaluasi kebijakan dijabarkan sebagai berikut.

- a. Evaluasi berguna untuk mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya (Warman et al., 2021).
- b. Mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan. Setiap kebijakan harus dibuat berdasarkan standar, dengan melakukan evaluasi maka derajat pencapaian standar dan sasaran kebijakan dapat diketahui (Akbar & Mohi, 2018, p. 20; Halimah, 2020).
- c. Mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency. Dengan evaluasi maka dapat dilakukan audit keefektifan biaya pengeluaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan beserta manfaatnya dapat diketahui (Akbar & Mohi, 2018; Halimah, 2020; Hayat, 2019).
- d. Mengetahui dampak dari kebijakan. Dengan evaluasi maka akan terlihat pengaruh positif dan negatif dari kebijakan terhadap masyarakat sehingga dapat memperbaiki keadaan masyarakat (Akbar & Mohi, 2018; Halimah, 2020; Mergoni & De Witte, 2022).
- e. Sebagai kontrol terhadap kebijakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Akbar & Mohi, 2018; Halimah, 2020).
- f. Sebagai rekomendasi, evaluasi bertujuan untuk mengetahui dampak intervensi eksogen dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat sehingga evaluasi berperan penting dalam mendorong perbaikan kebijakan yang akan datang (Akbar & Mohi, 2018; Mergoni & De Witte, 2022).
- g. Eksplanasi, evaluasi bertujuan untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati (Halimah, 2020; Hayat, 2019).

### **4. Tipe-Tipe Evaluasi**

Tipe- tipe evaluasi Pendapat Langbein yang dikutip oleh Hayat (2018) membagi tipe evaluasi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Tipe Evaluasi hasil (outcomes of public policy implementation) yang merupakan riset yang mendasarkan diri sebagai tujuan kebijakan. Berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan berdasarkan tingkat tercapainya tujuan program atau kebijakan.
- b. Evaluasi proses (proses of public policy implementation) adalah penelitian evaluasi yang berdasarkan pada petunjuk teknis dan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan kebijakan berdasarkan pada kesesuaian proses pelaksanaan dengan petunjuk yang tersedia.

### **5. Model Evaluasi Kebijakan**

Model evaluasi hadir karena terdapat usaha yang terus menerus dilakukan secara konsisten dari proses kemajuan pengukuran dan keinginan manusia untuk menggeneralisasi prinsip-prinsip evaluasi agar menjadi lebih nyata (Mardiah & Syarifudin, 2019).

Sebagai evaluator harus memilih salah satu di antara berbagai model-model evaluasi karena setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan. Mengenai hal tersebut, berikut ini adalah pertimbangan dalam memilih model evaluasi

(Halimah, 2020):

- a. Pertimbangan teknis. Evaluatur dalam memutuskan kebijakan yang akan dievaluasi mempertimbangkan manfaat dan dampaknya bagi kebijakan tersebut.
- b. Pertimbangan biaya. Evaluatur perlu mempertimbangkan bahwa salah satu jenis evaluasi akan memerlukan biaya yang besar dari model evaluasi yang lainnya.
- c. Pertimbangan waktu. Evaluatur perlu memperhatikan waktu sehingga penelitian yang dilaksanakan tidak tergesa-gesa atau tidak terlalu lama. Oleh karenanya harus dipilih model evaluasi yang sesuai dengan waktu yang tersedia.
- d. Pertimbangan pemangku kepentingan. Evaluatur mempertimbangkan pemilihan model evaluasi sesuai permintaan penyandang dana yang menginginkan model evaluasi tertentu.

## KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan adalah tahapan akhir dari suatu kebijakan yang harus dilakukan evaluasi kebijakan adalah suatu usaha menganalisis guna mencari kebenaran terhadap program yang berasal dari pihak berwenang melalui substansi/isi program, implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut sehingga mampu menyediakan informasi yang objektif dan valid mengenai pencapaian suatu program dalam kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Concepts, General, and Policy Evaluation. 2023. "Konsep Umum Evaluasi Kebijakan." 3:25–32.
- Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan. Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, S. (1994). Kebijakan Publik; Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia.
- Halimah, N. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN 03 dan SMPN 17 Tangerang Selatan.
- Hayat. (2019). Buku Kebijakan Publik. <https://www.researchgate.net/publication/335788910>
- Mergoni, A., & De Witte, K. (2022). Policy Evaluation and Efficiency: a Systematic Literature Review. *International Transactions in Operational Research*, 29(3), 1337–1359. <https://doi.org/10.1111/ITOR.13012>
- Prabowo, R., Setiawan, F., Wibowo, J. M., Oktarina, R., & Rahmadia, N. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(8). <https://doi.org/10.36418/jii.v1i8.298>
- Hajaroh, M. (2019). Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *FOUNDASIA*, 9(1). <https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26149>
- Warman, W., Lorensius, L., & Rohana, R. (2021). Curriculum of Management in Improving the Quality of Catholic School Education in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 3677–3688. <https://doi.org/10.33258/BIRCI.V4I3.2136>